

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan utama didirikannya suatu negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, dan salah satu langkah untuk mewujudkannya adalah melalui pembangunan. Sebagaimana kita ketahui, pembangunan merupakan salah satu amanah yang tertuang dalam UUD 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Paradigma pembangunan baru beranggapan bahwa pembangunan harus dilakukan atas dasar inisiatif dan dorongan dari masyarakat, artinya masyarakat harus diberikan kesempatan untuk mengambil peran emansipatoris dalam setiap proses pembangunan, mulai dari tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan hingga menikmati hasil dan evaluasi. Pembangunan juga erat kaitannya dengan pengembangan masyarakat karena dalam proses pembangunan diperlukan upaya untuk mempersiapkan masyarakat memperkuat kelembagaannya agar mampu memposisikan dirinya secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, proses pengembangan masyarakat juga memerlukan keterlibatan pemerintah atau pihak lain untuk menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang ingin dicapai. Upaya ini merupakan wujud nyata pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan dipahami sebagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. (Andreas & Enni Savitri, 2016:13).

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan suatu proses perubahan sosial yang melibatkan upaya masyarakat bersama pihak lain di luar sistem sosial untuk menjadikan sistem masyarakat tersebut menjadi pola dan tatanan kehidupan yang lebih baik. Proses ini berlangsung melalui kegiatan kolektif dan jejaring yang dikembangkan oleh masyarakat sehingga mereka mempunyai kemampuan dan kemandirian baik secara ekonomi, ekologi, dan sosial (Ardito Bhinadi, 2007:23).

Untuk memenuhi pemberdayaan tersebut, istilah pemberdayaan semakin menjadi bagian dari realitas kehidupan masyarakat saat ini, khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan atau semi perkotaan. Bagi masyarakat pedesaan, sektor pertanian merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup mereka karena merupakan mata pencaharian utama mereka. Selain itu, sektor pertanian juga mempunyai kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja, penghasil devisa negara, penyediaan bahan pangan pokok dan bahan baku industri. Oleh karena itu pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat petani juga merupakan bagian dari program pembangunan nasional yang tidak lepas dari prinsip otonomi daerah, sehingga

dengan pemberdayaan masyarakat maka masyarakat ikut terlibat aktif dalam membangun kesejahteraannya dan kesejahteraan negara.

Dalam pembangunan pertanian, tujuan pemberdayaan diarahkan untuk mewujudkan perbaikan teknis usahatani, peningkatan usaha usahatani, peningkatan taraf hidup petani dan masyarakat serta peningkatan aksesibilitas petani dan pemangku kepentingan pertanian terhadap sumber inovasi, input usahatani, pasar dan sumber daya manusia. jaminan harga serta pengambilan keputusan politik. (Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, 2019:109). Sehingga program pemberdayaan masyarakat petani yang akan dilaksanakan harus mendukung terwujudnya tujuan pembangunan tersebut.

Kopi merupakan salah satu komoditas pertanian yang mempunyai kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. (Kep-MenTan.No.511.2006). Sejak ditanam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, kopi menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia. Saat ini Indonesia merupakan negara penghasil dan pengekspor kopi keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Faktor luas lahan dan produktivitas menjadi kendala Indonesia masih kalah bersaing dengan negara-negara dominan kopi lainnya.

Luas perkebunan kopi di Indonesia saat ini mencapai 1,26 juta ha dan 96% dari total lahan perkebunan diusahakan oleh petani skala kecil dengan modal dan pengetahuan yang minim dalam pengembangan kopi, sehingga sebagian besar teknik budidaya masih belum sesuai. dengan rekomendasi *Good Agriculture Practice* (GAP) karena masih menggunakan benih asal atau

benih sisa dari Belanda yang sudah tidak produktif lagi. Dari lahan seluas 1,26 juta ha, kopi yang dihasilkan hanya mencapai 40-60% dari total produktivitas yang bisa dibudidayakan. Artinya ke depan peluang peningkatan produktivitas kopi Indonesia masih terbuka lebar karena kondisi geografis yang ideal untuk pengembangan dan budidaya tanaman kopi khususnya kopi arabika. Apalagi saat ini permintaan pasar internasional lebih memilih kopi Arabika dibandingkan kopi Robusta.

Pemerintah sebenarnya telah merumuskan beberapa kebijakan terkait pengembangan dan eksportir kopi untuk mendukung produktivitas dan kualitas kopi di Indonesia. Kebijakan tersebut antara lain Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/M-DAG/PER/7/2008 tentang Baku Mutu Kopi Ekspor, Peraturan Menteri Perdagangan No. 10/M-DAG/PER/5/2011 tentang Izin Ekspor Bagi Eksportir Kopi dan Peraturan Menteri Pertanian No. 52/PERMENTAN/OT.140/9/2012 mengenai teknologi pasca panen. Kebijakan tersebut dituangkan dalam program dan strategi pengembangan kopi melalui peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas tanaman kopi berkelanjutan, revitalisasi lahan, penyediaan benih unggul, perbaikan kelembagaan dan sumber daya manusia petani, pembiayaan petani dan penetapan standar mutu kopi nasional (Sistem Nilai Cacat sesuai dengan keputusan Organisasi Kopi Internasional). (IPB, 2017:1-3). Namun pada kenyataannya kebijakan-kebijakan tersebut masih belum terlaksana dengan baik sehingga produktivitas kopi di Indonesia masih belum optimal, khususnya bagi perkebunan kopi yang berstatus perkebunan rakyat.

Kampung Wea Distrik Pasema merupakan salah satu sentra penghasil kopi arabika di Kabupaten Yahukimo. Topografi Kabupaten Yahukimo sangat bervariasi, mulai dari dataran rendah dengan kemiringan landai hingga daerah perbukitan dengan kemiringan curam. Sedangkan ketinggiannya antara 100 – 3.000 meter di atas permukaan laut. Keberadaan kopi arabika di Kampung Wea Distrik Pasema dimulai sejak zaman Belanda di Indonesia sampai sekarang. Saat ini tanaman kopi Arabika menjadi salah satu sumber pendapatan ekonomi utama masyarakat setempat. Secara umum petani kopi di Kampung Wea Distrik Pasema mempunyai keinginan untuk meningkatkan produktivitas hasil di bidang komoditi kopi, namun karena banyaknya kendala yang mereka hadapi, hal tersebut sulit terwujud. Kurangnya pemahaman petani dalam budidaya kopi yang baik, minimnya modal, lemahnya kelembagaan petani, mentalitas petani kopi dalam menjaga produktivitas kopi yang seringkali berbanding terbalik dengan hasil yang didapat ditambah kurangnya bantuan dari pemerintah mengenai penanganan kopi yang tepat menjadi penyebabnya. untuk tetap menyebar. kemiskinan di kalangan petani skala kecil.

Dinas Perkebunan Provinsi Papua terus mendorong produksi kopi agar mampu memenuhi permintaan pasar. Menurut Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua, produksi kopi saat ini rata-rata masih 500-600 kilogram per hektar. Ia berharap ke depan mampu meningkatkan produksi hingga 800-900 kilogram per hektar.

Termasuk dalam upaya penyiapan benih kopi unggul yang berkualitas bagi petani dan penggarap di kabupaten tersebut. Bahkan, ke depan Pemprov akan membuka lahan khusus untuk pembibitan kopi unggul dan berkualitas. Dengan harapan ketika ada perluasan lahan, petani dapat menanam bibit yang telah disediakan. Artinya ketika ada perluasan lahan maka benih yang diambil harus benar-benar berkualitas unggul dan tidak ditanam sembarangan.

Selain menyiapkan lahan kopi, Pemprov Papua juga melakukan upaya promosi. Pemprov Papua telah berkomunikasi dengan berbagai pihak dengan melibatkan beberapa instansi terkait seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mempopulerkan kopi yang dibudidayakan masyarakat Papua. Beberapa kopi asal Papua yang saat ini sedang populer di pasaran yaitu kopi merk Cartens, kopi biru Baliem, kopi Waga-Waga dan lain-lain.

Kopi-kopi tersebut sebagian merupakan produksi lokal yang terus dikembangkan, namun untuk memenuhi permintaan pasar kami masih kesulitan bahan bakunya. Sehingga perluasan areal tanam kopi memang perlu terus kita dorong. Namun sekali lagi harus dipastikan kopi yang ditanam bisa tumbuh, berbuah dan menghasilkan hasil terbaik. Agar mampu memenuhi permintaan pasar yang ada saat ini baik dari dalam maupun luar negeri.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop) Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua terus mendorong masyarakat asli Papua untuk mengembangkan industri kopi di daerahnya. Pengembangan industri kopi ini di Yahukimo, dengan merencanakan pengembangan lahan kopi tidak hanya di Distrik Pasema

namun juga di Distrik Kurima, namun lokasi industri kopi berada di Kabupaten Tangma.

Kopi Kimo merupakan hasil tani masyarakat lokal yang ada di beberapa daerah di kabupaten Yahukimo. Kopi kimo atau kopi yahukimo ini adalah salah satu prodak unggulan yang di kelola langsung oleh perusahaan daerah (Prusda) yahukimo makmur dan merupakan kopi arabica pertama kabupaten yahukimo yang di panen dari hasil perkebunan masyarakat kabupaten yahukimo. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur utama Prusda Kabupaten Yahukimo bahawa masih banyak lahan perkebunan di yahukimo selama ini tidak di kelola dengan baik sehingga diri-nya berusaha mengajarkan masyarakat untuk dapat mengelolah lahan perkebunan mereka sehingga saat ini dapat berkembang dan menghasilkan prodak unggulan yaitu kopi yahukimo atau yg lebih di kenal dengan kopi kimo hal ini juga berguna untuk membantu meningkatkan hasil pendapatan masyarakat yahukimo.

Menurut Iyas Yusuf (2014:05) fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain: sebagai regulator, sebagai dinamisator, dan sebagai fasilitator

Langkah-langkah yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop) Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua dalam meningkatkan mutu kopi di Kabupaten Yahukimo adalah:

- Pemerintah menyiapkan perangkat peraturan daerah yang terkait dengan pengembangan peningkatan kualitas kopi di Kabupaten Yahukimo.
- Pemberian bantuan mesin pengolah kopi di Yahukimo milik masyarakat yang tergabung dalam wadah usaha koperasi.
- Mempersiapkan gudang untuk menampung kopi yang dihasilkan,
- Mempromosikan kopi di Kabupaten Yahukimo, kopi ini sangat unggul dan berbeda jika dibandingkan dengan kopi di sejumlah daerah lain di Papua, terutama di daerah pegunungan yang menjadi komoditas kopi arabika,
- Pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan kopi, dimulai dari sebuah ide yang diminati masyarakat sehingga perlu didorong untuk dikembangkan menjadi usaha patungan dengan masyarakat setempat.
- Mengolah kopi dari kopi Tangma dan Kurima hingga menjadi bahan jadi sebelum dipasarkan ke wilayah di Papua.
- Membantu masyarakat dalam mendapatkan izin Industri Limbah Rumah Tangga (IPRT) dan Balai POM serta izin dari Pemerintah Provinsi Papua
- Saat ini Pemkab Yahukimo, lanjutnya, berupaya untuk selalu memproduksi kopi lokal. (Disperindakop Kabupaten Yahukimo, 2023).

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan di atas, dan ketahanan pangan merupakan isu strategis yang menjadi perhatian saat ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan

Kualitas Produksi Kopi Masyarakat Di Kampung Wea Distrik Pasema Kabupaten Yahukimo”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Produksi Kopi Masyarakat Di Kampung Wea Distrik Pasema Kabupaten Yahukimo?
2. Apa saja kendala-kendala Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Produksi Kopi Masyarakat Di Kampung Wea Distrik Pasema Kabupaten Yahukimo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Produksi Kopi Masyarakat Di Kampung Wea Distrik Pasema Kabupaten Yahukimo
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Produksi Kopi Masyarakat Di Kampung Wea Distrik Pasema Kabupaten Yahukimo.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini diantaranya adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi kepentingan penelitian, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisa suatu masalah dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Produksi Kopi Masyarakat.
 - b. Bagi kepentingan akademik, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini merupakan salah satu bahan masukan terkait dengan Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Produksi Kopi Masyarakat.
 - b. Bagi masyarakat, hasil menelitian ini merupakan sebuah kajian praktis yang dapat membuka wawasan berfikir masyarakat dalam aspek peranan pemerintah daerah.